

Analisis Efektivitas Kebijakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Gugus Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

Ipan Sopandi¹, Rusliandy², Agus Suarman Sudarsa³

Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: plara1217@gmail.com^{1*}, rusliandy1980@gmail.com²,

agussuarman08@gmail.com³

Info Artikel

Submitted: 10 April 2026

Revised : 30 April 2026

Accepted: 07 Mei 2026

Published: 23 Mei 2026

Keywords: BOSP, Policy Effectiveness, School Finance, Educational Quality, Elementary School

Kata Kunci: BOSP, Efektivitas Kebijakan, Keuangan Sekolah, Mutu Pendidikan, Sekolah Dasar

Abstract

This study analyzes the effectiveness of the School Operational Assistance policy at Gugus Tugujaya, Cigombong District. Previous studies on school operational funding have tended to emphasize administrative compliance, while the link between fund management and educational quality outcomes remains insufficiently examined. Using a descriptive qualitative approach, the study draws on interviews, focus group discussion, observation, and document analysis of planning, realization, reporting, and triangulation records. The findings show that BOSP management in seven elementary schools is procedurally on-track: planning, organizing, implementation, and reporting have followed applicable mechanisms and are supported by RKAS and accountability documents. However, the policy is not yet fully on-target because its contribution to learning quality, infrastructure use, and student achievement is not optimal. The main influencing factors are human resource capacity, communication, organizational structure, and implementer attitudes. The study contributes an outcome-oriented distinction between procedural compliance and substantive effectiveness in evaluating BOSP management.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Gugus Tugujaya Kecamatan Cigombong. Kajian terdahulu tentang BOSP cenderung menekankan kepatuhan administratif, sedangkan keterkaitan antara pengelolaan dana dan capaian mutu pendidikan belum banyak dijelaskan secara mendalam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, Focus Group Discussion, observasi, dan analisis dokumen perencanaan, realisasi, pelaporan, serta triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BOSP pada tujuh sekolah dasar telah berjalan on-track secara prosedural karena perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaporan mengikuti mekanisme yang berlaku serta didukung dokumen RKAS dan pertanggungjawaban. Namun, kebijakan belum sepenuhnya on-target karena kontribusinya terhadap mutu pembelajaran, pemanfaatan sarana prasarana, dan capaian belajar belum optimal. Faktor yang memengaruhi efektivitas meliputi kapasitas sumber daya manusia, komunikasi, struktur organisasi, dan sikap pelaksana. Kebaruan penelitian ini adalah pembedaan evaluatif antara kepatuhan prosedural dan efektivitas substantif dalam pengelolaan BOSP.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Pendidikan dasar menempati posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia karena menjadi fondasi bagi pembentukan pengetahuan, keterampilan, karakter, dan partisipasi sosial peserta didik. Di Indonesia, hak memperoleh pendidikan dijamin oleh konstitusi dan dipertegas melalui sistem pendidikan nasional. Dalam kerangka tersebut, pembiayaan pendidikan tidak hanya menjadi persoalan teknis anggaran, tetapi juga instrumen kebijakan publik untuk memperluas akses, menjaga keberlanjutan layanan, dan meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu instrumen pembiayaan yang berperan penting adalah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yaitu dukungan pendanaan pemerintah bagi satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan mendukung penyelenggaraan pendidikan secara lebih merata.

Kebijakan BOSP memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan riil satuan pendidikan, sepanjang tetap berada dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 dan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 menegaskan bahwa pengelolaan dana bantuan operasional harus diarahkan untuk menopang layanan pendidikan dan dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks sekolah dasar, pengelolaan BOSP yang baik diharapkan tidak hanya mengurangi beban pembiayaan, tetapi juga memperkuat proses pembelajaran, ketersediaan sarana prasarana, dan capaian mutu pendidikan.

Kajian terdahulu mengenai BOSP cenderung menempatkan pengelolaan dana pada dimensi kepatuhan administratif, penyusunan RKAS, pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas. Studi tentang pengelolaan BOSP pada sekolah dasar, misalnya, menunjukkan pentingnya kesesuaian antara rencana anggaran, pembagian tugas, realisasi, dan laporan pertanggungjawaban (Nursiniah & Aliyyah, 2024). Kajian lain juga menekankan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana sebagai ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembiayaan sekolah (Fakhiroh et al., 2024; Rizalluddin et al., 2023). Namun, fokus pada kepatuhan prosedural belum selalu memadai untuk menjelaskan apakah dana yang telah dikelola sesuai aturan benar-benar menghasilkan perubahan substantif terhadap mutu pendidikan.

Kesenjangan tersebut menjadi titik berangkat artikel ini. Tesis yang menjadi sumber utama naskah ini menunjukkan bahwa masalah di Gugus Tugujaya Kecamatan Cigombong tidak hanya terkait dengan keberadaan dana, tetapi juga dengan kualitas perencanaan, koordinasi tim pengelola, keterlambatan pelaporan manual, realisasi dana yang belum selalu mencapai seratus persen pada

tahun sebelumnya, serta keterbatasan kapasitas dalam estimasi anggaran. Situasi ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari tersedianya dokumen dan kepatuhan prosedur. Evaluasi juga perlu melihat hubungan antara proses pengelolaan dana dengan dampak nyata terhadap pembelajaran, sarana prasarana, dan hasil belajar.

Dalam perspektif Dunn (2018), efektivitas kebijakan merupakan salah satu kriteria evaluasi yang menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil, tetapi tidak terlepas dari kecukupan, responsivitas, pemerataan, dan ketepatan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan BOSP dapat disebut efektif apabila penggunaan dana tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga memadai untuk menjawab kebutuhan sekolah dan menghasilkan kontribusi terhadap mutu pendidikan. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran mutu pendidikan yang menempatkan input, proses, dan output sebagai rangkaian yang saling berkaitan (Sallis, 2002). Dana merupakan input strategis, pengelolaan merupakan proses, sedangkan mutu pembelajaran dan capaian peserta didik merupakan output yang harus diperiksa secara kritis.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan Dana BOSP di Gugus Tugujaya Kecamatan Cigombong serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Kebaruan artikel ini terletak pada penegasan perbedaan antara keberhasilan administratif dan efektivitas substantif. Artikel ini mengembangkan argumen bahwa pengelolaan BOSP di Gugus Tugujaya telah berjalan on-track secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya on-target dalam menghasilkan peningkatan mutu pendidikan. Dengan kata lain, kontribusi ilmiah artikel ini adalah memperlihatkan pentingnya evaluasi BOSP yang berorientasi pada outcome, bukan hanya pada kepatuhan dokumen dan mekanisme pelaporan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena fenomena yang dikaji memerlukan pemahaman mendalam mengenai praktik, pengalaman, dan dinamika pengelolaan Dana BOSP di tingkat satuan pendidikan. Lokasi penelitian adalah Gugus Tugujaya Kecamatan Cigombong, Desa Tugujaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penelitian dirancang berlangsung mulai Mei 2025 sampai selesai. Gugus Tugujaya dipilih karena merepresentasikan ekosistem pendidikan dasar yang terdiri atas beberapa sekolah dengan karakteristik peserta didik, sarana prasarana, dan kapasitas sumber daya manusia yang beragam.

Subjek penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Dana BOSP, yaitu kepala sekolah, bendahara atau operator BOSP, guru, pengawas,

komite sekolah, dan tim manajemen BOSP sekolah. Jumlah informan, karakteristik rinci informan, serta teknik penetapan informan perlu dipastikan kembali dalam naskah final berdasarkan data lapangan [PERLU DILENGKAPI]. Pemilihan informan diarahkan pada pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan penggunaan dana.

Data primer diperoleh melalui wawancara, Focus Group Discussion, observasi, dan catatan lapangan. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan penilaian informan mengenai efektivitas pengelolaan dana. Focus Group Discussion digunakan untuk menangkap perspektif kolektif mengenai faktor pendukung dan penghambat. Observasi dilakukan untuk melihat praktik pengelolaan dan kondisi nyata di sekolah. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen, terutama RKAS, laporan realisasi anggaran, bukti penggunaan dana, notulen rapat, dan dokumen pendukung lain yang relevan.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian, khususnya efektivitas kebijakan, proses pengelolaan, faktor yang memengaruhi, dan dampak terhadap mutu pendidikan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis dan tabel tematik. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, Focus Group Discussion, dan dokumentasi. Melalui prosedur ini, temuan penelitian tidak hanya menggambarkan peristiwa administratif, tetapi juga menafsirkan makna kebijakan BOSP dalam konteks praktik sekolah dasar.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Gugus Tugujaya Kecamatan Cigombong terdiri atas tujuh sekolah dasar, yaitu SDN Tugujaya 02, SDN Tugujaya 01, SDN Cipetir 01, SDN Cipetir 02, SDN Cibogo, SDN Sukamanah, dan SDN Batukarut. Ketujuh sekolah berada dalam satu wilayah koordinasi, tetapi memiliki variasi jumlah peserta didik dan kebutuhan sekolah. Kondisi ini menjadikan Gugus Tugujaya sebagai ruang yang relevan untuk melihat bagaimana kebijakan BOSP diimplementasikan dalam konteks sekolah dasar yang tidak sepenuhnya homogen.

Berdasarkan dokumen penelitian, jumlah peserta didik pada tujuh sekolah tersebut mencapai 1.640 orang dengan total alokasi BOSP tahun 2025 sebesar Rp1.774.170.000. Data ini menunjukkan bahwa BOSP merupakan sumber daya fiskal yang signifikan bagi keberlangsungan operasional

sekolah dasar di Gugus Tugujaya. Rincian alokasi dana sebagaimana tercantum dalam dokumen penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alokasi Dana BOSP Tahun 2025 pada Gugus Tugujaya

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Siswa	BOSP 2025 (Rp)
1	SDN Tugujaya 02	357	370.220.000
2	SDN Tugujaya 01	206	211.860.000
3	SDN Cipetir 01	289	323.140.000
4	SDN Cipetir 02	234	235.400.000
5	SDN Sukamanah	151	153.010.000
6	SDN Cibogo	270	350.000.000
7	SDN Batukarut	112	130.540.000
Total		1.640	1.774.170.000

Sumber: Dokumen hasil penelitian tesis, diolah untuk artikel.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOSP di Gugus Tugujaya telah berjalan on-track dari sisi prosedural. Seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan, telah dijalankan sesuai ketentuan. Dokumen RKAS, laporan realisasi, bukti transaksi, notulen rapat, dan bukti penggunaan dana tersedia sebagai dasar pertanggungjawaban. Informasi dari wawancara, observasi, Focus Group Discussion, dan dokumentasi memperlihatkan konsistensi bahwa sekolah telah memahami prosedur dasar pengelolaan dan pelaporan BOSP.

Pada tahap perencanaan, sekolah menyusun kebutuhan melalui RKAS sebagai acuan penggunaan anggaran. Pada tahap pelaksanaan, dana digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional dan kegiatan pembelajaran. Pada tahap pelaporan, sekolah menyusun laporan melalui mekanisme daring dan manual. Pelaporan daring dilakukan melalui ARKAS, sedangkan laporan manual disusun dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Dari sisi kepatuhan administratif, tidak ditemukan penyimpangan signifikan dalam dokumen penelitian, sehingga aspek prosedural dapat dinilai relatif terpenuhi.

Meskipun demikian, capaian mutu pendidikan belum sepenuhnya on-target. Beberapa informan menilai bahwa dana telah membantu operasional sekolah, tetapi dampaknya terhadap hasil belajar dan mutu pembelajaran belum terlihat signifikan. Observasi menunjukkan bahwa proses

pembelajaran tetap berjalan, tetapi variasi metode pembelajaran masih terbatas dan pemanfaatan sarana prasarana belum optimal. Dokumentasi nilai dan rapor mutu sekolah juga belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan adanya jarak antara kepatuhan prosedur dan efektivitas substantif.

Faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan BOSP di Gugus Tugujaya terutama berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, komunikasi, struktur organisasi, dan sikap pelaksana. Keterbatasan kompetensi teknis dalam perencanaan dan pelaporan membuat pengelolaan cenderung berfokus pada pemenuhan administrasi rutin. Koordinasi dan monitoring belum sepenuhnya maksimal, sehingga penggunaan dana belum selalu diarahkan pada program strategis peningkatan mutu. Di sisi lain, adanya dokumen, rapat, dan mekanisme pelaporan menunjukkan bahwa sekolah memiliki modal kelembagaan untuk memperbaiki orientasi pengelolaan dana ke arah yang lebih berbasis hasil.

Tabel 2. Ringkasan Triangulasi Temuan Efektivitas Dana BOSP

Aspek	Wawancara/FGD	Observasi	Dokumentasi	Kesimpulan
Kepatuhan prosedur	Wawancara menyebutkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah dilakukan sesuai ketentuan.	Observasi menunjukkan rapat, pencatatan, dan pelaporan berjalan tertib.	Tersedia RKAS, laporan realisasi, notulen, dan bukti penggunaan dana.	Konsisten; prosedur berjalan on-track.
Capaian mutu	Sebagian informan merasakan manfaat dana, tetapi dampak pada hasil belajar belum signifikan.	Pembelajaran berjalan, namun variasi metode dan pemanfaatan sarana prasarana belum optimal.	Data nilai dan rapor mutu sekolah belum menunjukkan peningkatan signifikan.	Belum sepenuhnya konsisten; mutu belum on-target.
Faktor pendukung dan penghambat	Kendala utama terdapat pada kapasitas SDM, pemahaman	Koordinasi dan monitoring belum maksimal.	Ada bukti sosialisasi atau pelatihan, tetapi belum merata	Konsisten; faktor konteks kuat memengaruhi efektivitas.

Aspek	Wawancara/FGD	Observasi	Dokumentasi	Kesimpulan
	teknis, dan fokus administrasi.		efektivitasnya.	

Sumber: Hasil triangulasi wawancara, Focus Group Discussion, observasi, dan dokumentasi, diolah untuk artikel.

Pembahasan

Temuan on-track namun belum on-target memperlihatkan bahwa pengelolaan BOSP di Gugus Tugujaya telah memenuhi dimensi kepatuhan administratif, tetapi belum sepenuhnya mencapai efektivitas substantif. Dalam perspektif Dunn (2018), efektivitas tidak berhenti pada terlaksananya prosedur, melainkan pada ketercapaian tujuan kebijakan. Apabila tujuan BOSP adalah mendukung mutu layanan pendidikan, maka indikator keberhasilan harus mencakup perubahan pada pembelajaran, sarana prasarana, dan capaian peserta didik, bukan hanya keberadaan RKAS dan laporan pertanggungjawaban.

Temuan ini memperkuat kritik terhadap evaluasi kebijakan yang terlalu berorientasi pada dokumen. Kepatuhan terhadap juknis memang penting karena dana BOSP merupakan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, kepatuhan tidak otomatis menghasilkan perbaikan mutu apabila perencanaan belum berbasis kebutuhan prioritas, pelaksanaan belum diarahkan pada program strategis, dan evaluasi belum mengukur perubahan hasil. Dengan demikian, efektivitas BOSP perlu dipahami sebagai hubungan antara perencanaan, penggunaan dana, dan outcome pendidikan.

Dari sisi manajemen sekolah, hasil penelitian menunjukkan pentingnya kapasitas sumber daya manusia. Kepala sekolah, bendahara, operator, guru, pengawas, dan komite sekolah memiliki peran berbeda dalam siklus pengelolaan dana. Apabila kompetensi teknis, komunikasi, dan pembagian tugas belum kuat, maka pengelolaan akan cenderung aman secara administratif tetapi kurang inovatif secara programatik. Pandangan Steers (1985) mengenai efektivitas organisasi relevan dalam konteks ini karena keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh output, tetapi juga oleh kualitas proses internal, karakteristik anggota, dan praktik manajerial.

Temuan penelitian juga dapat dibaca melalui kerangka mutu pendidikan. Sallis (2002) menekankan bahwa mutu pendidikan berkaitan dengan keterhubungan antara input, proses, dan output. Dalam kasus Gugus Tugujaya, dana BOSP telah hadir sebagai input yang besar. Namun, kontribusinya terhadap mutu bergantung pada proses pengelolaan: apakah dana dipetakan berdasarkan kebutuhan pembelajaran, apakah program disusun berdasarkan data mutu sekolah, dan

apakah evaluasi dilakukan dengan melihat dampak bagi peserta didik. Kegagalan menghubungkan input dengan output akan membuat dana operasional hanya menjadi instrumen rutin, bukan pengungkit perbaikan mutu.

Novelty artikel ini terletak pada konseptualisasi dua tingkat keberhasilan kebijakan, yaitu keberhasilan prosedural dan keberhasilan substantif. Keberhasilan prosedural merujuk pada tertib perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Keberhasilan substantif merujuk pada kemampuan kebijakan menghasilkan perbaikan nyata pada mutu pendidikan. Dalam konteks BOSP, kedua tingkat ini harus berjalan bersama. Sekolah tidak cukup hanya tertib administrasi, tetapi juga perlu memastikan bahwa setiap alokasi dana memiliki alasan pedagogis dan indikator hasil yang dapat diperiksa.

Implikasi praktisnya adalah perlunya penguatan perencanaan berbasis kebutuhan dan data mutu sekolah. RKAS sebaiknya tidak hanya menjadi dokumen kepatuhan, tetapi menjadi instrumen strategi peningkatan mutu. Program yang dibiayai BOSP perlu dikaitkan dengan masalah prioritas sekolah, seperti penguatan literasi, peningkatan kualitas pembelajaran, pemanfaatan sarana prasarana, atau dukungan bagi guru. Evaluasi internal juga perlu diarahkan pada pertanyaan apakah dana yang digunakan benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan peserta didik.

Selain itu, penguatan kapasitas pengelola menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan dan pendampingan tidak cukup hanya membahas teknis pelaporan, tetapi juga perlu mencakup penyusunan program berbasis outcome, analisis kebutuhan, pengendalian risiko, dan evaluasi dampak. Pengawas dan komite sekolah dapat diperkuat perannya sebagai mitra reflektif, bukan semata pemeriksa kelengkapan dokumen. Dengan demikian, mekanisme pengawasan dapat bergerak dari kontrol administratif menuju supervisi substantif yang mendorong inovasi dan perbaikan mutu.

Batasan artikel ini adalah ketergantungannya pada data yang tersedia dalam dokumen tesis. Beberapa aspek penting, seperti jumlah informan, kutipan langsung informan, rincian periode pengumpulan data, dan indikator hasil belajar yang lebih terukur, masih perlu dilengkapi untuk memperkuat validitas naskah jurnal [PERLU DILENGKAPI]. Meskipun demikian, data yang tersedia telah cukup menunjukkan pola utama bahwa efektivitas kebijakan BOSP di Gugus Tugujaya harus dibaca melalui hubungan antara kepatuhan prosedural, kapasitas implementasi, dan capaian mutu pendidikan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Dana BOSP di Gugus Tugujaya Kecamatan

Cigombong telah berjalan on-track dari sisi prosedural, karena tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai ketentuan serta didukung dokumen pertanggungjawaban. Namun, efektivitas substantif kebijakan belum sepenuhnya on-target karena dampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran, pemanfaatan sarana prasarana, dan hasil belajar peserta didik belum optimal. Dengan demikian, keberhasilan administratif belum dapat disamakan dengan keberhasilan kebijakan secara utuh.

Faktor yang memengaruhi efektivitas BOSP meliputi kapasitas sumber daya manusia, kualitas komunikasi, kejelasan struktur pengelola, sikap profesional pelaksana, serta orientasi evaluasi yang masih dominan administratif. Artikel ini menegaskan bahwa pengelolaan BOSP perlu diarahkan pada perencanaan berbasis kebutuhan dan outcome pendidikan. Sekolah, pengawas, komite, dan pemangku kebijakan perlu memperkuat kapasitas pengelola, memperbaiki koordinasi, serta mengembangkan evaluasi internal yang tidak hanya memeriksa kelengkapan laporan, tetapi juga menilai dampak penggunaan dana terhadap mutu pendidikan. Penelitian selanjutnya perlu melengkapi temuan kualitatif ini dengan data capaian belajar, indikator mutu sekolah, dan analisis perbandingan antar satuan pendidikan agar evaluasi efektivitas BOSP menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Fakhiroh, E. Z., Budi, I. S., & Kholik, A. (2024). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana BOSP (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN Kowel 3 Pamekasan. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(2), 873-887.
- Nursiniah, S., & Aliyyah, R. R. (2024). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSPP) pada sekolah dasar. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2832-2855.
- Pebriyanti, D., & Aliyyah, R. R. (2024). Manajemen keuangan: Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSPP) pada sekolah dasar. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2716-2737.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Rizalluddin, A., Nadeak, T., & Astriani, D. (2023). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSPp) pada SDN Teluk Bango VI Desa Gongcai Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 687-704.

Sallis, E. (2002). *Total quality management in education* (3rd ed.). Kogan Page.

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi* (M. Jamin, Trans.; Cet. 4). Erlangga.